

PERUBAHAN KONDISI PKL SETELAH PENATAAN, STABILISASI, DAN RELOKASI DI KOTA SURAKARTA

Murtanti Jani Rahayu ^{*)}

^{*)} Staf pengajar di Prodi PWK FT UNS dan anggota PIPW LPPM UNS

mjanirahayu@gmail.com

Abstract

Distribution of street vendors which occurs sporadically, making such a irregular view in the urban environment. This case motivates an action to restructure them. In Surakarta, the arrangement of PKL has been done since years ago and its top action was in 2006 with the relocation of street vendors of Monuments 45 Banjarsari Surakarta to Market Klitikan Notoharjo Semanggi. Besides the relocation, the arrangement is also done through the form of stabilization. Which type of arrangement is more successful to be applied?

This study tried to see some changes that occur from the PKL arrangement, ie by comparing the pra condition before arrangement and after the arrangement. There are 13 aspects of PKL measured, they are spacious stalls, trade time, the amount of merchandise, the number of visitors, levy, supported facilities, and the role of the community. Then, the data analysis was done with Paired t-test, where the value of Sig <0.05 indicates a change between the average condition before and after the arrangement, correlation coefficient indicates the magnitude of the changes that occur before and after the arrangement. The respondents who answer the questionnaire taken using quota technique (30 respondents who were based on types of merchandises from five types of merchandises, both relocated merchants and stabilized merchants.

From the government view, the PKL arrangement is considered successful. The PKL actors accomodated in the markets and public spaces of the city. PKL is no longer as cause of congestion and slum environment. Economically the city, the market and the street vendors as populist economic base which has brought charges and large income to the city itself, but in terms of PKL itself, it has really different view. There are nine changes in the relocation arrangement including a comprehensive relocation shanties, levies and income. In term of stabilized arrangement, there are 5 changes, such as making the urban environment seems more orderly and beautiful, because of large and homogenous stalls, and and it is also formed a definite business climate and comfortable, although most the income of traders does not increase.

Keywords: *street vendors, stabilization, relocation*

1. PENDAHULUAN

Pertumbuhan sektor informal di perkotaan terus meningkat, jumlahnya sulit dikendalikan. Apalagi subsektor PKL, di Kota Surakarta belum pernah mencapai zero growth, seperti yang diharapkan pemerintah (Rahayu et al, 2013). PKL secara harfiah adalah perusahaan kecil yang mandiri, namun terikat oleh jaringan social ekonomi yang rumit. Berhubungan dengan banyak pihak; saingan, langganan, pemberi pinjaman, petugas pemerintah, dan berbagai pengelola kebijakan (Bromley, 1979). Seperti halnya makhluk hidup yang secara organik tumbuh dan berkembang, demikian juga PKL. PKL bukan benda mati yang bisa ditekan pertumbuhannya dan dihilangkan sesuai kehendak kita, sehingga pendekatan yang paling sesuai adalah penataan bukan penggusuran atau menghilangkan keberadaannya. Pemicu utama kondisi ini adalah tingginya angka pelaku urbanisasi, yang secara umum mereka hanya memiliki pendidikan, keterampilan, dan kapasitas yang sangat terbatas (Hariyono 2007). Menurut De Soto, bahwa aktivitas ekonomi informal itu muncul sebagai reaksi atas buntunya akses masyarakat mendapatkan legalitas dan sulitnya birokrasi. Hal ini terjadi ketika legalitas hukum merupakan hak istimewa yang bisa diperoleh segelintir orang atau kelompok

melalui akses politik dan ekonomi. Inilah biaya mahal yang harus dbayar demi memperoleh legalitas hukum dan pelayanan.

Di Kota Surakarta, jumlah PKL pernah mengalami penurunan yang signifikan, meski di tahun-tahun berikutnya jumlah PKL naik turun. Data yang diperoleh dari Dinas Pengelolaan Pasar (2010) diketahui bahwa pada tahun 2005, jumlah PKL mencapai 5.817 yang tersebar di 5 kecamatan di kota Surakarta. Sedangkan data tahun 2007, jumlah PKL sebanyak 3.917. Dan data tahun 2010 jumlah PKL sebanyak 2.104 PKL. Hal ini berarti terjadi penurunan jumlah PKL. Dari tahun 2005 sampai dengan 2010 tercatat turun 63% yaitu sekitar 3.713 PKL. Penurunan secara signifikan ini dikarenakan telah dilakukan penataan PKL di beberapa tempat dengan cara relokasi seperti PKL Monumen 45 Banjarsari ke Pasar Notoharjo dan PKL belakang kampus ke pasar Panggung Rejo. Selanjutnya jumlah PKL tahun 2012 mencapai 2.816. Hasil observasi tahun 2014 ini diperoleh data jumlah PKL yang belum ditata di kota Surakarta saat itu adalah 2.920. Lebih tinggi dari data tahun 2012 dan tahun 2010 (tabel 1).

Tabel 1
Jumlah PKL Kota Surakarta tahun 2005 – 2014

No.	Tahun	Jumlah
1.	2005	5.817
2.	2007	3.917
3.	2010	2.104
4.	2012	2.816
5.	2014	2.920

Sumber : Berbagai sumber 2010-2014

Pertumbuhan PKL yang sangat subur mendorong dilakukannya penataan besar-besaran pada tahun 2006 . Setelah itu terbit Perda No. 3 Tahun 2008 tentang Pengelolaan PKL dimana pemerintah berwenang untuk menetapkan, memindahkan dan menghapus lokasi PKL dengan memperhatikan kepentingan sosial, ekonomi, ketertiban dan kebersihan lingkungan di sekitarnya. Bentuk penataan PKL di Kota Surakarta dilakukan dengan menggunakan bentuk penataan relokasi dan stabilisasi. Penataan bentuk stabilisasi yaitu Manahan, Psr Buah Purwosari, Ursulin, dekat PDAM, TMP, City Walk, Solo Square, Jl Wahidin, Ngarsopuro, Galabo, Kotta barat, Pucangsawit, Mojosongo, Komplang, sedangkan bentuk penataan relokasi dilakukan di pasar Notoharjo, Panggungrejo, Silir, Elpabes.

Hasilnya? Dari sudut pandang pemerintah, penataan PKL kota Surakarta termasuk berhasil. Secara fisik, keduanya telah dapat merubah wajah kota menjadi lebih indah dan teratur. Para PKL

terwadahi di ruang-ruang public kota. PKL sudah tidak lagi sebagai penyebab kemacetan dan kekumuhan. Dari sudut pandang ekonomi kota, pasar dan PKL sebagai basis ekonomi kerakyatan telah mendatangkan retribusi sebagai pendapatan kota yang cukup besar (Rahayu et al, 2013). Namun dari sisi data PKL sendiri menunjukkan bahwa tujuan penataan PKL belum sepenuhnya berhasil mencapai tujuan pengelolaan secara menyeluruh. Banyak PKL yang mengalami penataan relokasi memilih pindah dari lokasi relokasi. Sementara PKL yang ditata dengan cara stabilisasi merasa penghasilannya belum meningkat signifikan.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian kuantitatif ini menggali data 13 kondisi PKL sebelum dan sesudah penataan, yaitu (1). luas lapak/lahan dagang, (2). waktu berdagang, (3). jumlah dagangan, (4). jumlah pengunjung, (5). retribusi, (6). pendapatan bersih, (7). keamanan, (8). kualitas sarana, (9). kebersihan lokasi, (10). fasilitas pendukung, (11). peran PKL, (12). peran dinas dan (13). peran paguyuban, baik PKL relokasi maupun stabilisasi. Pengambilan responden dengan teknik kuota sampling sejumlah 30 responden/jenis dagangan dari 5 jenis dagangan baik pedagang hasil relokasi maupun stabilisasi. Di dalam Rahayu et al (2013), jenis dagangan PKL diklasifikasikan menjadi:

- 1) Makanan mentah a.l sayur mayur, buah-buahan, daging, ikan, ayam,
- 2) Makanan siap saji di bawa pulang a.l jus, kripik, gorengan, srabi, pukis,
- 3) Makanan siap saji dimakan di tempat a.l warung bakmi, warung makan jawa, padang,
- 4) Non makanan a.l baju, onderdil, HP, rokok, tanaman hias, dompet,
- 5) Jasa pelayanan/*services* a.l tukang cukur, tambal ban, afdruk foto, tukang jahit/permak.

Teknik analisa yang dipakai compared means, Paired T-test/uji T-test Berpasangan, dimana Nilai Sig < 0,05 menunjukkan terjadi perubahan secara signifikan antara kondisi rata-rata sebelum penataan dan sesudah penataan begitu pula sebaliknya. Koefisien Correlation menunjukkan besarnya perubahan yang terjadi sebelum dan sesudah penataan dilakukan, semakin besar angka semakin kuat korelasi yang terbentuk (Sarwono, 2006).

3. DATA DAN PEMBAHASAN

Penataan PKL yang dilakukan di kota Surakarta ini sesuai dengan tindakan penataan lokasional Mc Gee and Yeung (1977) yaitu pemindahan, relokasi dan stabilisasi. Penataan yang dilakukan di kota Surakarta adalah sebagai berikut (Rahayu et al, 2013).

a. Penataan Stabilisasi

Istilah PKL penataan dipergunakan oleh Sarjono (2005) untuk menyebut stabilisasi. Penataan Stabilisasi dengan membangun sarana dagang yang lebih baik, legal dan sebagian permanen di lokasi yang tidak terlalu jauh dari lokasi semula atau tetap (Mc Gee and Yeung, 1977). Dominasi penataan

stabilisasi dilakukan pada PKL makanan siap saji di tempat dan dibawa pulang, meskipun dilakukan juga pada sebagian PKL makanan mentah seperti buah-buahan dan sayuran. Beberapa bentuk sarana dagang yang telah diberikan oleh Pemerintah Kota Surakarta antara lain :

- *Shelter*, yaitu pembangunan sarana dagang/tempat dagang berupa *shelter* yang disediakan secara gratis di lokasi asal PKL berjualan. Stabilisasi melalui pembangunan *shelter* yang telah dilakukan meliputi PKL yang berada di sekitar Manahan, sekitar Solo Square, lingkungan Jurug, Pucangsawit, Pedaringan, Jl. Wahidin, dan lain-lain;
- Tendanisasi , berupa pendirian tenda secara tidak permanen/*knock down* di lokasi tertentu setiap waktu/secara menerus maupun di lokasi tertentu pada waktu tertentu saja. Pada kasus sarana dagang tenda di lokasi tertentu pada waktu tertentu, bisa dibongkar pasang sehingga keberadaan tenda sebagai sarana dagang PKL tidak mengganggu pemandangan fisik karena bisa dibongkar dan dipindah setelah PKL selesai beraktivitas. Sebagai contoh, penataan terhadap PKL Ngarsopuro, PKL Kota Barat PKL depan Beteng dan/Galabo;
- Gerobak, yaitu penyediaan sarana dagang yang bersifat *mobile*, diperuntukkan bagi PKL yang berada di lokasi yang tidak mungkin untuk didirikan *shelter* maupun tenda. Contoh penataan dengan menggunakan sarana usaha gerobak yaitu PKL di Kawasan Citywalk, Jl. Slamet Riyadi, PKL serabi Jl Slamet Riyadi. PKL Galabo, PKL Pucangsawit, dan PKL Kotta Barat. Terdapat kawasan yang saat ini telah ditutup seperti sebagian PKL city walk.

Upaya penataan yang dilakukan oleh pemerintah sendiri ditujukan untuk dapat menyediakan lokasi berdagang/kantong-kantong bagi para PKL yang lebih rapi dan legal (RTRW Kota Surakarta, 2012-2030), sehingga PKL tidak menempati lokasi-lokasi yang terlarang bagi PKL. Selain itu, upaya penataan tersebut juga dalam rangka untuk melakukan penertiban lingkungan kota yang sejalan dengan upaya penghijauan kota, dimana lokasi berdagang dari para PKL yang lama dibuat menjadi taman/jalur hijau demi kepentingan umum yang lebih besar. Oleh karenanya, diharapkan kedua kepentingan tersebut dapat terakomodasi. Kepentingan PKL terakomodir, karena tidak menghilangkan atau mematikan usaha yang menjadi mata pencaharian mereka. Sebaliknya kepentingan kota serta masyarakat yang lain tidak dikorbankan karena lingkungan kota tetap tertib terjaga, terhindar dari kekumuhan, kemacetan dan konflik antar masyarakat yang merupakan tujuan ketiga pengelolaan PKL (Perda Kota Surakarta No. 3/2008).

Dari data yang telah diperoleh dari responden melalui kuestioner terkait 13 aspek PKL yang dteliti meliputi : (1). luas lapak/lahan dagang, (2). waktu berdagang, (3). jumlah dagangan, (4). jumlah pengunjung, (5). retribusi, (6). pendapatan bersih, (7). keamanan, (8). kualitas sarana, (9). kebersihan lokasi, (10). fasilitas pendukung, (11). peran PKL, (12). peran dinas dan (13). peran paguyuban. Kemudian dilakukan analisis data melalui uji T-test Berpasangan, yaitu membandingkan antara kondisi sebelum dan sesudah stabilisasi terdapat lima yang mengalami perubahan, yaitu retribusi, kualitas sarana, kebersihan lokasi, fasilitas pendukung dan peran paguyuban. Meski terdapat beberapa

perubahan yang tidak mempunyai korelasi yang kuat akibat adanya stabilisasi yaitu kebersihan, fasilitas pendukung dan peran paguyuban, namun aspek retribusi dan kualitas sarana mempunyai korelasi kuat (tabel 2).

Sesuai tujuan penataan PKL pada satu sisi, yang menertibkan dan memperindah lingkungan sekitar (Perda Kota Surakarta No. 3/2008), stabilisasi PKL berhasil meningkatkan kualitas lingkungan dan kenyamanan kawasan berdagang menjadi lebih baik. Hal ini ditunjukkan dengan semakin meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana/fasilitas pendukung kegiatan PKL maupun kebersihan lingkungan sekitarnya. Fasilitas pendukung yang bertambah dan meningkat kualitasnya adalah : ketersediaan listrik, pompa air, MCK, tempat cuci, dan tempat parkir dan papan promosi. Kebersihan lingkungan, selain PKL sendiri turut serta menjaganya, juga ada petugas kebersihan yang secara periodik menyapu dan mengambil sampah yang telah dikumpulkan.

Walaupun secara keseluruhan luasan lapak baru rata-rata sama bahkan ada yang lebih sempit dengan luasan lahan dagang sebelumnya yaitu 6 m², namun justru terjadi peningkatan rata-rata jumlah retribusi yang harus dibayarkan oleh PKL setelah penataan dari Rp. 1000 menjadi Rp. 2500. Luasan lapak yang awalnya diinginkan pedagang bisa lebih besar (terutama PKL makanan siap saji di tempat) dari sebelum penataan sulit untuk diwujudkan. Namun demikian menurut tim penataan PKL kota Surakarta (1998) luasan yang ideal adalah 6 m², berarti sudah sesuai dengan standart kebutuhan luasan. Banyaknya jumlah pedagang, membuat pemerintah harus berusaha seadil mungkin mendistribusikan lapak, sehingga seluruh pedagang yang aktif mendapatkan haknya kembali setelah penataan. Sesuai dengan Perda pemungutan retribusi yang berlaku saat ini, retribusi penggunaan lahan fasilitas umum meningkat dibanding retribusi sebelumnya. Hal ini sangat wajar karena ketentuan retribusi sebelumnya sudah cukup lama diberlakukan.

Dengan kondisi barunya setelah penataan, PKL berusaha untuk terus meningkatkan kapasitasnya dalam berusaha (pemberdayaan). Menurut Utami (2010), banyak usulan dari paguyuban PKL untuk diadakannya penyuluhan/pelatihan. Menurut Hendytio (dalam Prijono S dan Pranarka, 1996), program pemberdayaan tersebut dapat memberikan peluang serta kesempatan kepada PKL untuk meningkatkan kapasitas diri, sehingga mampu menentukan masa depan yang diinginkan. Upaya pemberdayaan seperti ini membutuhkan intervensi baik dari pemerintah maupun dukungan dari *stakeholders* PKL. Program pemberdayaan tersebut meliputi penyuluhan berbagai pengetahuan, baik manajemen berdagang, diversifikasi usaha, penyuluhan perilaku berdagang maupun pengajuan modal usaha (Wawancara Paguyuban, 2013). Pemberdayaan melalui tindakan pendidikan, menurut Mc Gee and Yeung (1977) juga untuk mendidik para PKL sehingga akan memberikan hasil yang positif, dengan memberikan *training* dan latihan manajemen, ketrampilan serta pengetahuan tentang kebersihan.

Akan tetapi, dari berbagai upaya yang telah dilakukan diatas, ternyata belum mampu meningkatkan pendapatan/kesejahteraan pedagang secara signifikan, yang diindikasikan oleh jumlah

konsumen dan jumlah dagangan secara signifikan tidak berubah setelah penataan. Dalam hal ini, hanya sebagian PKL yang merasakan peningkatan pendapatannya setelah penataan, sebagian lagi tetap. Senada disampaikan Hanifah dan Mussadun (2014) bahwa penataan bentuk penyeragaman sarana dagang, sebutan lain dari penataan stabilisasi di Simpang lima Semarang, dianggap lebih berhasil dari sisi fiskal dan sosial tapi tidak berhasil dari sisi ekonomi, pendapatan PKL menurun (gambar 1).



Stabilisasi Manahan



Stabilisasi Sekartaji



Stabilisasi Mojosongo



Stabilisasi Komplang



Relokasi Pasar Elpabes



Relokasi Pasar Paggungrejo

Gambar 1 : PKL setelah Penataan Stabilisasi dan Relokasi
Sumber: Dokumentasi Peneliti 2016

Tabel 2
Analisis Kondisi PKL Sebelum dan Sesudah Dilakukan Stabilisasi

No.	Kondisi PKL	Perubahan Rata-rata (Mean)		Besarnya Korelasi dan Tingkat Signifikansi Kondisi Sebelum dan Sesudah		
		Sebelum	Sesudah	Koef. Corr	Sig.	Analisis
1.	Luas lapak	7.72	7.98	.422	.020	Korelasi tidak kuat dan signifikan
2.	Jam operasional	8.10	7.78	.942	.000	Korelasi kuat, dan signifikan
3.	Jumlah dagangan	100.00	106.83	.	.	-
4.	Jumlah pengunjung	68.33	68.33	.940	.000	Korelasi kuat, dan signifikan
5.	Retribusi	1373.33	2100.00	.575	.001	Korelasi kuat, dan signifikan
6.	Pendapatan bersih	215000.00	194500.00	.594	.001	Korelasi kuat, dan signifikan
7.	Keamanan	2.43	2.73	.719	.000	Korelasi kuat, dan signifikan
8.	Kualitas sarana	2.60	3.00	.538	.002	Korelasi kuat, dan signifikan
9.	Kebersihan lokasi	2.47	3.13	.381	.038	Korelasi tidak kuat, dan signifikan
10.	Fasilitas pendukung	2.23	2.80	.424	.020	Korelasi tidak kuat, dan signifikan
11.	Peran PKL	3.07	3.03	.914	.000	Korelasi kuat, dan signifikan
12.	Peran Dinas	2.43	2.60	-.078	.682	Korelasi tidak kuat, dan tidak signifikan
13.	Peran Paguyuban	1.97	2.70	.462	.010	Korelasi tidak kuat dan signifikan

Sumber: Hasil Analisis Peneliti

b. Keberhasilan Penataan Relokasi

Relokasi, yaitu merupakan tindakan pemindahan PKL ke kawasan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota. Istilah yang sama dipergunakan oleh Sarjono (2005). Relokasi dominasinya diterapkan pada PKL non makanan (termasuk kelontong) dan jasa. Juga terdapat PKL makanan siap saji di tempat. Sebagai contoh, relokasi PKL Monjari ke Pasar Klithikan Notoharjo, relokasi PKL ke Pasar Silir, dan relokasi PKL Belakang Kampus UNS ke Pasar Panggungrejo dan relokasi PKL ke pasar Elpabes dan pasar Gilingan pada akhir tahun 2015 lalu.

Para PKL yang direlokasi mayoritas menyetujui upaya penataan yang dilakukan oleh pihak Pemerintah Kota Surakarta, karena adanya perasaan aman atas legalitas yang diberikan. Dengan adanya legalitas tempat usaha dagang di tempat yang baru, para PKL tidak lagi merasa takut akan digusur sewaktu-waktu oleh petugas.

Hasil penelitian terhadap PKL Relokasi kota Surakarta, dari 13 kondisi yang diukur, terdapat 11 kondisi yang mengalami perubahan setelah relokasi dilakukan, yaitu luas lapak, jumlah dagangan, jumlah pengunjung, retribusi, pendapatan bersih, keamanan, kualitas sarana pendukung, kebersihan, jumlah fasilitas pendukung, peran dinas dan peran paguyuban. Penataan PKL melalui relokasi telah berhasil meningkatkan kualitas estetika dan kenyamanan kawasan menjadi lebih baik, diindikasikan oleh semakin meningkatnya jumlah pengunjung, keamanan, kualitas dan jumlah sarana/fasilitas, kebersihan lingkungan, yang disertai dengan peran pengaturan oleh Pemerintah yang semakin besar. Peningkatan ini juga diikuti dengan peningkatan pendapatan bersih PKL, meskipun secara keseluruhan luasan lapak baru rata-rata lebih kecil daripada luasan area dagang sebelumnya.

Secara umum, dapat dikatakan bahwa bentuk penataan relokasi lebih signifikan memberikan dampak lebih terhadap kondisi PKL, dibandingkan dengan bentuk penataan stabilisasi, termasuk juga ketercapaian dari tujuan penataan PKL untuk menciptakan keindahan/ketertiban juga lebih terlihat keberhasilannya (tabel 3).

Penelitian tentang keberhasilan relokasi di pasar Waru Semarang menunjukkan hasil yang agak berbeda. Dari aspek fisik dan social berhasil sedangkan aspek ekonomi kurang berhasil (Hanifah dan Musadun, 2014). Hal serupa terjadi di Bogota, bahwa relokasi secara fisik dan kinerja berhasil baik/positif namun tidak mampu meningkatkan pendapatan PKL (Donovan, 2008).

Secara estetika sebagaimana menjadi salah satu tujuan penataan PKL, relokasi PKL berhasil membuat kualitas estetika dan kenyamanan kawasan menjadi baik, yaitu dengan indikasi semakin meningkatnya jumlah pengunjung, keamanan, kualitas dan jumlah sarana/fasilitas, kebersihan disertai dengan peran pemerintah yang makin besar dalam mengatur. Dibandingkan dengan bentuk penataan stabilisasi, bentuk penataan ini lebih signifikan memberikan dampak lebih pada kondisi PKL. Walaupun beberapa kondisi dianggap agak berkurang dari sebelum dilakukan penataan, yaitu kebersihan, fasilitas pendukung serta peran pemerintah dan PKL. Menurut David (1994) Untuk menangani PKL diperlukan adanya kebersamaan dan pengejawantahan dalam hal menentukan lokasi pedagang kakilima sampai kepada formalisasi.

Di samping hasil yang diperoleh di atas, pada awal tahun 2016 digali preferensi PKL akan penataan relokasi dan stabilisasi. Sekitar 75% menyatakan bahwa mereka lebih memilih penataan Stabilisasi karena lokasi yang diberikan tidak jauh/sama dengan lokasi lama yang cukup strategis.

Tabel 3
Analisis Kondisi PKL Sebelum dan Sesudah Dilakukan Relokasi

No.	Kondisi PKL	Perubahan Rata-rata (Mean)		Besarnya Korelasi dan Tingkat Signifikansi Kondisi Sebelum dan Sesudah		
		Sebelum	Sesudah	Koef. Correlation	Sig.	Analisis
1.	Luas lapak	12.34	8.20	.724	.000	Korelasi kuat dan signifikan
2.	Jam operasional	7.90	7.63	-.006	.973	Korelasi tidak kuat, dan tidak signifikan
3.	Jumlah dagangan	100.00	148.00	.	.	-
4.	Jumlah pengunjung	29.00	44.00	.237	.208	Korelasi tidak kuat, dan tidak signifikan
5.	Retribusi	600.00	2661.50	-.349	.058	Korelasi tidak kuat, dan tidak signifikan
6.	Pendapatan bersih	55166.67	79500.00	.943	.000	Korelasi kuat dan signifikan
7.	Keamanan	2.77	3.93	.075	.695	Korelasi tidak kuat, dan tidak signifikan
8.	Kualitas sarana	1.93	3.83	.257	.171	Korelasi tidak kuat, dan tidak signifikan
9.	Kebersihan lokasi	2.37	3.37	-.002	.991	Korelasi tidak kuat, dan tidak signifikan
10.	Fasilitas pendukung	1.93	3.73	-.064	.737	Korelasi tidak kuat, dan tidak signifikan
11.	Peran PKL	3.67	3.53	-.039	.838	Korelasi tidak kuat, dan tidak signifikan
12.	Peran Dinas	1.80	3.67	-.192	.308	Korelasi tidak kuat, dan tidak signifikan
13.	Peran Paguyuban	3.67	2.57	-.177	.350	Korelasi tidak kuat, dan tidak signifikan

Sumber: Hasil Analisis Data Peneliti

4. KESIMPULAN DAN TEMUAN

Stabilisasi dilakukan terhadap dominasi PKL makanan siap saji. Perubahan yang dialami PKL hasil penataan Stabilisasi, dari 13 aspek yang diteliti yaitu pada 5 aspek : retribusi, kualitas sarana, kebersihan lokasi, fasilitas pendukung dan peran paguyuban. Namun hanya dua aspek yaitu retribusi dan kualitas sarana yang mempunyai korelasi yang kuat dan signifikansi yang juga kuat.

Relokasi dilakukan pada PKL non makanan dan jasa. Perubahan yang dialami PKL hasil relokasi adalah 11 aspek yang mengalami perubahan setelah relokasi dilakukan, yaitu luas lapak, jumlah dagangan, jumlah pengunjung, retribusi, pendapatan bersih, keamanan, kualitas sarana pendukung, kebersihan, jumlah fasilitas pendukung, peran dinas dan peran paguyuban. Namun hanya 2 aspek yaitu luas lapak dan pendapatan yang mempunyai korelasi dan signifikansi yang kuat.

Namun dari hasil penggalan preferensi terhadap PKL yang dilakukan pada awal tahun 2016 PKL lebih memilih penataan stabilisasi dibanding relokasi karena alasan factor lokasi yang lebih strategis dan lebih dekat dengan rumah tinggal PKL.

5. UCAPAN TERIMA KASIH

Disampaikan rasa terima kasih yang setinggi-tingginya kepada:

- UNS dalam pembiayaan penelitian PNBPN yang telah memberikan kepercayaan kepada peneliti untuk melakukan penelitian PKL ini.
- Para PKL dan ketua paguyuban PKL kota Surakarta yang bersedia menjadi responden dan narasumber
- Kepala bidang penataan PKL, DPP, kota Surakarta dan
- Tim lapangan para mahasiswa prodi PWK UNS

6. DAFTAR PUSTAKA

- Bromley, R. (1979). *Organization, Regulation and Exploitation in the So-Called 'Urban Informal Sector': The Street Traders of Cali, Colombia. The Urban Informal Sector: Critical Perspectives on Employment and Housing Policies*. Oxford, Pergamon Press: 1161-1172
- David, C.C., 1994. *Peer Reconstruction : A Case Study in West Venezuela*, International Labor Office, Geneva.
- De Soto, H (1989). *The Other Path: the Invisible Revolution in the Third World*. New York: New York: Harper & Row.
- Donovan, Michael G. January 2008. *Informal Cities and the Contestation of Public Space: The Case of Bogotá's Street Vendors, 1988-2003*, *Urban Stud* vol. 45 no. 1 29-51, Sage Publisher
- Dinas Pengelolaan Pasar, 2010. *Kompilasi Data PKL Kota Surakarta*, DPP Kota Surakarta
- Hanifah, Umami dan Mussadun. Des 2014. Keberhasilan Relokasi PKL di Kawasan Pasar Waru dan Simpang Lima, Semarang. MPWK, *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota Undip* vol. 25, no. 3, hlm. 228-242, SAPPK ITB dan IAP

- Hariyono, Paulus. 2007. *Sosiologi Kota untuk Arsitek*. Jakarta : PT Bumi Aksara
- Mc. Gee, T. G dan Yeung, Y. M. 1977. *Hawkers In Southeast Asian Cities: Planning for The Bazaar Economy*. Canada: International Development Research Centre.
- Onny S Prijino dan AMW Pranarka (eds) 1996. *Pemberdayaan : Konsep, Kebijakan dan Implementasi* , CSIS, Jakarta
- Peraturan Daerah Kota Surakarta No. 3 tahun 2008 tentang *Pengelolaan Pedagang Kaki Lima Kota Surakarta*
- Rahayu, et al. 2013. *Strategi Pemberdayaan PKL secara Partisipatif dalam Mendorong Ekonomi yang Berkelanjutan di Kota Surakarta*. UNS, Surakarta
- Sarwono, Jonathan,. 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta :Graha Ilmu
- Sarjono, Yetty, Dr, MSi. 2005. *Pergulatan PKL di Perkotaan, Pendekatan Kualitatif*. Muh. Univ. Press.
- Utami, Trisni. 2010. *Pemberdayaan Komunitas Sektor Informal Suatu Alternatif Penanggulangan Kemiskinan*. Jurnal Sosiologi Dilema Fisip UNS Surakarta